

Analisis Literatur: Kebijakan Publik terhadap kemiskinan Pemuda di DIY

Rini Admiwati

Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Indonesia

Email Korespondensi: riniadmiwati@gmail.com

Abstrack: *Youth poverty poses a substantial challenge to social and economic progress in the Special Region of Yogyakarta (DIY), despite its cultural richness and human capital potential. Barriers such as limited educational access, scarce job opportunities, and inadequate healthcare persist among DIY's youth. Local government and related bodies have implemented various public policies aimed at tackling these issues. This study conducts a comprehensive literature review analyzing these policies, drawing from academic articles, government reports, and policy documents. It focuses on policy identification, effectiveness assessment, impacts, and factors influencing implementation. Successful policies have notably improved educational and employment opportunities for DIY's youth. However, challenges like bureaucratic complexity, inter-agency coordination issues, and funding limitations hinder comprehensive and sustainable implementation. Continuous policy evaluation is essential to ensure effective poverty alleviation and community benefit. Recommendations emphasize enhancing cross-sector collaboration, implementation coordination, and regular policy monitoring and evaluation to promote inclusive development aligned with DIY youth needs.*

Keywords; *poverty; youth; public policy; DIY;*

Abstrak: Kemiskinan pemuda tetap menjadi tantangan serius dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), meskipun DIY kaya akan budaya dan potensi sumber daya manusia. Pemuda di wilayah ini menghadapi kendala seperti akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas, peluang kerja yang langka, dan layanan kesehatan yang kurang memadai. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah dan lembaga terkait telah menerapkan berbagai kebijakan publik. Studi ini melakukan analisis literatur terhadap kebijakan-kebijakan tersebut yang bertujuan mengurangi kemiskinan pemuda di DIY. Melalui penelusuran artikel akademis, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan, penelitian ini mengidentifikasi kebijakan yang telah diterapkan, mengevaluasi dampaknya, serta mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Temuan utama menunjukkan beberapa kebijakan yang berhasil meningkatkan akses pendidikan dan kesempatan kerja bagi pemuda. Namun, tantangan seperti birokrasi yang kompleks dan koordinasi antar lembaga yang kurang efektif tetap menjadi hambatan besar dalam implementasi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pengambil kebijakan, peneliti, dan praktisi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik di DIY. Rekomendasi meliputi perluasan kolaborasi lintas-sektor untuk optimalisasi implementasi kebijakan yang ada dan peningkatan evaluasi rutin guna memastikan keberlanjutan kebijakan serta kesesuaian dengan kebutuhan pemuda di DIY.

Kata Kunci: kemiskinan; pemuda; kebijakan publik; DIY;

Article Information: Submitted: 2024-05-27; Revised 2024-06-10; Accepted: 2024-07-15



This work is licensed under a

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

INTRODUCTION

Kemiskinan kaum muda di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan isu multifaset yang secara signifikan menghambat Pembangunan sosial dan ekonomi Kawasan ini, meskipun warisan budaya dan potensi sumber daya manusianya yang kaya. Kehadiran banyak universitas dan Lembaga Pendidikan tinggi di DIY tidak selalu berarti peningkatan kesejahteraan bagi semua pemuda, karena berbagai tantangan tetap ada. Akses terbatas ke Pendidikan berkualitas tetapi menjadi penghalang kritis, karena pengeluaran pemerintah untuk Pendidikan, meskipun ditargetkan, belum cukup mengurangi kemiskinan karena interaksi kompleks dari faktor-faktor lain seperti pengangguran dan layanan Kesehatan yang tidak memadai [1],[2]. Tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan pemuda memperburuk kemiskinan, karena pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan industri belum diterjemahkan ke dalam peluang kerja yang memadai, dengan upah minimum dan Tingkat Pendidikan menunjukkan efek negatif pada peluang kerja di wilayah tersebut [3].

Berbagai kebijakan publik telah diperkenalkan oleh pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk mengatasi masalah kemiskinan pemuda di Daerah Istimewa Yogyakarta mencakup pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, dan Kesehatan, pengelolaan dana Istimewa, diversifikasi pendapatan, namun belum mengatasi masalah secara komprehensif [2],[4]. Keberhasilan sebuah kebijakan publik tidak hanya tergantung pada implementasinya, tetapi juga pada evaluasi yang mendalam terhadap dampak dan efektivitasnya. Evaluasi tidak hanya sekedar mengukur sejauh mana kebijakan telah diterapkan secara teknis, tetapi lebih pada pemahaman tentang bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi kehidupan nyata pemuda di DIY.

Studi ini akan melakukan analisis literatur yang komprehensif terkait kebijakan publik yang telah diterapkan di DIY untuk mengurangi kemiskinan di kalangan pemuda. Fokus utama studi adalah mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang telah berhasil mencapai tujuan pengentasan kemiskinan pemuda, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Dengan menggali data dan informasi dari berbagai sumber literatur yang terpercaya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pengambil kebijakan, peneliti, dan praktisi terkait tentang efektivitas kebijakan yang ada. Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik dan lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas hidup pemuda di DIY, serta berkontribusi positif dalam upaya pemberantasan kemiskinan secara luas.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini akan menggunakan metode kajian literatur sebagai pendekatan utama untuk mengungkap dan mengevaluasi kebijakan publik yang telah diterapkan di DIY dalam Upaya mengurangi kemiskinan pemuda. Pendekatan kajian literatur dipilih karena memungkinkan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk artikel ilmiah, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan. Proses kajian literatur akan dimulai dengan pencarian sistematis



dangan selektif terhadap literatur yang tersedia melalui basis data akademik seperti Google Scholar dan Scopus. Literatur yang dipilih akan disortir berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, seperti relevansi dengan topik penelitian, kualitas metodologi, dan kontribusi terhadap pemahaman tentang kebijakan publik di DIY terkait dengan kemiskinan pemuda. Setelah pengumpulan literatur selesai, analisis mendalam akan dilakukan untuk mengidentifikasi kebijakan-kebijakan public yang telah ada, tujuan-tujuan yang ingin di capai, strategi implementasi yang digunakan, serta evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan tersebut. Selanjutnya, temuan-temuan dari literatur akan disintesis dan diinterpretasikan untuk menghasilkan Kesimpulan yang kuat dan rekomendasi kebijakan yang berdasarkan pada bukti empiris.

RESULT

Dari analisis literatur yang dilakukan, berikut adalah beberapa hasil utama yang ditemukan:

Identifikasi Kebijakan Publik

Beberapa program dalam kebijakan yang telah dilaksanakan dan harus dilaksanakan oleh pemerintah DIY dalam menanggapi kemiskinan terutama pada kemiskinan kaum muda dapat diuraikan seperti beberapa tema di bawah ini sesuai dengan temuan penelitian empiris dilapangan.

Tabel 1. Hasil Identifikasi Literatur

No	Peneliti	Prgram Kebijakan
1	(Akbar & Taufiq, 2023; Surur & A'yun, 2023)	Pendidikan, pelatihan dan peluang kerja
2	(Rahman et al., 2023; Ramadhani et al., 2024; Sugiyanto et al., 2022)	Kesehatan dan lingkungan berfokus kepada kaum muda dan penyandang cacat
3	(Zulham & Rochimah, 2023)	Pengelolaan dana istimewa
4	(Finuliyah et al., 2023; Raziq & El Hasanah, 2023)	Desentralisasi fiskal dan Kebijakan upah minimum
5	(Aripin et al., 2023)	Kebahagiaan dan kebutuhan psikologis
6	(Purnomo et al., 2023; Susilowati et al., 2023)	Kekerasan dan intoleransi, Kejahatan jalanan di kalangan remaja

Sumber: Data literatur diolah 2024

Tujuan Kebijakan

Tujuan utama dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah untuk memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan yang berkualitas, meningkatkan kesempatan kerja yang layak, dan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dan keamanan yang memadai bagi pemuda di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap pemuda, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan tinggi yang bermutu, yang merupakan fondasi utama dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul. Melalui



peningkatan kualitas pendidikan, diharapkan akan lahir generasi muda yang kompeten, kreatif, dan inovatif, yang siap bersaing di kancah nasional maupun internasional.

Selain itu, peningkatan kesempatan kerja yang layak menjadi fokus utama dalam kebijakan ini. Dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan minat pemuda, serta menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan pemuda di DIY. Kebijakan ini juga mencakup pemberian insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan pemuda lokal, serta pengembangan kewirausahaan melalui berbagai program dukungan dan pembiayaan.

Dalam hal pelayanan kesehatan dan keamanan, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pemuda di DIY memiliki akses yang mudah dan terjangkau terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas. Ini mencakup peningkatan jumlah dan kualitas pusat kesehatan, penyediaan layanan kesehatan preventif dan kuratif yang komprehensif, serta program-program edukasi kesehatan yang menekankan pentingnya gaya hidup sehat. Di sisi keamanan, kebijakan ini juga melibatkan peningkatan sistem keamanan publik melalui patroli rutin, peningkatan fasilitas keamanan, dan program-program pendidikan mengenai keamanan bagi pemuda.

Secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan pemuda di DIY, sehingga mereka dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan..

DISCUSSION

Kesuksesan dan tantangan implementasi

Pemerintah daerah telah memprioritaskan pendidikan, sebagaimana dibuktikan dengan pengeluaran pemerintah yang ditargetkan yang telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan melalui program pendidikan yang efektif [2]. Selain itu, pelatihan kerja dan peluang kerja telah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan industri dan Produk Domestik Regional Bruto (GRDP), yang telah menunjukkan efek positif dan signifikan pada peluang kerja, meskipun upah minimum dan pengeluaran pemerintah tidak secara signifikan mempengaruhi pekerjaan [3]. Program bantuan sosial, bagaimanapun, telah menghadapi tantangan, sementara dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan, mereka kadang-kadang menyebabkan peningkatan ketergantungan pada bantuan pemerintah, sehingga tidak secara efektif mengurangi tingkat kemiskinan [2]. Program kesehatan di DIY juga telah menjadi titik fokus, terutama untuk kelompok rentan seperti penyandang cacat. Pemerintah daerah bekerjasama dengan kabupaten kota telah melaksanakan pelayanan kesehatan dan pendanaan, termasuk penyediaan alat bantu, meskipun masih ada kendala yang perlu ditangani, seperti pengumpulan data dan koordinasi antar pemangku kepentingan [5]. Terlepas dari upaya ini, pengelolaan dana istimewa telah dikritik karena tidak berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat, dengan liputan media sering menggambarkan upaya pemerintah daerah secara negative [4]. Masalah lingkungan, yang secara tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan kaum muda, juga menjadi perhatian karena pembangunan perkotaan yang cepat yang menyebabkan berkurangnya ruang hijau dan peningkatan risiko bencana. Upaya untuk mengurangi dampak ini meliputi sistem manajemen lingkungan dan sosial dan pendidikan masyarakat [6].



Desentralisasi fiskal telah memainkan peran dalam pengentasan kemiskinan, dengan pendapatan lokal digunakan untuk pengeluaran pro-miskin, meskipun efektivitas langkah-langkah ini tetap menjadi topik perdebatan [8]. Wilayah ini juga telah mengeksplorasi integrasi kesejahteraan subjektif ke dalam pembuatan kebijakan, mengakui bahwa kebahagiaan dan kebutuhan psikologis sangat penting untuk kesejahteraan secara keseluruhan, meskipun pendekatan ini belum sepenuhnya dioptimalkan [10]. Ketidaksetaraan pendapatan tetap menjadi masalah yang signifikan, dengan pendapatan sumber sendiri regional dan kebijakan upah minimum menjadi faktor penting dalam mengatasi perbedaan ini [9]. Selain itu, meningkatnya kekerasan dan intoleransi di Yogyakarta menimbulkan ancaman bagi reputasinya sebagai kota pelajar, mengharuskan kebijakan yang mempromosikan inklusivitas dan toleransi berdasarkan etika Pancasila untuk memastikan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pendidikan dan pengembangan pribadi [11]. Terakhir, kejahatan jalanan, terutama di kalangan remaja, telah menjadi perhatian yang berkembang, mendorong polisi untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan dan represif untuk mengekang kegiatan tersebut dan memastikan keselamatan public [12]. Secara kolektif, kebijakan-kebijakan ini mencerminkan strategi yang komprehensif namun kompleks untuk mengatasi kemiskinan kaum muda dan meningkatkan kesejahteraan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa kebijakan publik telah berhasil meningkatkan akses dan kesejahteraan pemuda di DIY. Misalnya, program beasiswa dan pelatihan kerja telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan keterampilan dan kesempatan kerja pemuda. Namun demikian, tantangan seperti birokrasi yang kompleks, koordinasi antar instansi yang kurang efektif, serta pendanaan yang terbatas sering kali menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Evaluasi dan monitoring

Pentingnya evaluasi dan monitoring berkala terhadap kebijakan-kebijakan publik menjadi sorotan utama dalam penelitian ini. Evaluasi yang sistematis dapat membantu mengidentifikasi kebijakan mana yang efektif dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Dalam konteks ini, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menilai efektivitas kebijakan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai dinamika pelaksanaan di lapangan. Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan guna meningkatkan kinerja kebijakan.

Lebih jauh, rekomendasi untuk penguatan mekanisme evaluasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi krusial dalam meningkatkan dampak positif kebijakan publik terhadap kemiskinan pemuda. Penguatan mekanisme ini mencakup penerapan metode evaluasi yang komprehensif, termasuk penggunaan data kuantitatif dan kualitatif, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses evaluasi. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, akademisi, dan organisasi non-pemerintah.

Selain itu, monitoring yang berkesinambungan memungkinkan pemantauan terhadap perkembangan kebijakan secara real-time, sehingga potensi masalah dapat diidentifikasi dan ditangani sejak dini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tujuan-



tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal dan sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efisien. Monitoring yang efektif juga menyediakan umpan balik yang diperlukan untuk perbaikan berkelanjutan, memungkinkan adaptasi kebijakan yang responsif terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Dengan adanya mekanisme evaluasi dan monitoring yang terstruktur dan berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta kebijakan publik yang lebih responsif dan adaptif, yang benar-benar mampu mengurangi kemiskinan pemuda di DIY. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan pemuda, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Hasil dari evaluasi dan monitoring ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan-kebijakan baru yang lebih efektif dan tepat sasaran di masa depan.

Rekomendasi kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan untuk mengintensifkan kolaborasi antar-stakeholder, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat sipil, dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Kolaborasi ini harus didasarkan pada komitmen bersama untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat, terutama pemuda yang rentan terhadap kemiskinan.

Penekanan khusus harus diberikan pada pengembangan program-program yang dapat meningkatkan keterampilan pemuda, baik melalui pelatihan vokasional, magang, maupun pendidikan formal dan non-formal. Program-program ini harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja yang dinamis, sekaligus membekali pemuda dengan kemampuan adaptasi dan inovasi yang tinggi. Di samping itu, akses pendidikan yang inklusif harus menjadi prioritas utama, dengan memastikan bahwa semua pemuda, tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

Selain peningkatan keterampilan dan akses pendidikan, pembangunan jaringan dukungan sosial yang kuat juga merupakan elemen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan di kalangan pemuda. Dukungan sosial ini dapat mencakup berbagai bentuk bantuan, seperti beasiswa, bantuan keuangan, layanan konseling, serta program mentoring dan bimbingan. Dengan adanya dukungan sosial yang komprehensif, diharapkan pemuda yang menghadapi tantangan ekonomi dapat lebih termotivasi dan mampu mencapai potensi maksimal mereka.

Kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus dilandasi oleh komunikasi yang efektif dan koordinasi yang erat. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator, mengarahkan dan menyelaraskan upaya-upaya berbagai pihak, serta menyediakan regulasi dan kebijakan yang mendukung. Lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, harus aktif dalam mengembangkan kurikulum yang relevan dan berkualitas. Sektor swasta dapat memberikan kontribusi melalui investasi dalam pendidikan dan pelatihan, serta menciptakan peluang kerja bagi pemuda. Sementara itu, masyarakat sipil dapat berperan dalam advokasi, pendampingan, dan pemberdayaan pemuda melalui berbagai program dan kegiatan komunitas.

Dengan mengintensifkan kolaborasi antar-stakeholder dan fokus pada pengembangan keterampilan, akses pendidikan yang inklusif, serta jaringan dukungan sosial, diharapkan kebijakan yang dirancang dan dilaksanakan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan pemuda di Daerah Istimewa



Yogyakarta. Hal ini akan mendorong terciptanya generasi muda yang tangguh, berdaya saing, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.

CONCLUSION

Studi ini menyoroti pentingnya kebijakan public yang berbasis bukti dan terukur dalam mengatasi kemiskinan pemuda di DIY. Meskipun telah ada kemajuan dalam implementasi kebijakan, tantangan-tantangan yang ada menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistic dan berkelanjutan. Evaluasi yang lebih mendalam dan rekomendasi kebijakan yang tepat dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan pemuda dan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam Pembangunan sosial dan ekonomi DIY. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pandangan yang jelas tentang landscape kebijakan publik terhadap kemiskinan pemuda di DIY serta menyediakan dasar yang kuat untuk pengembangan kebijakan lebih lanjut yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat pemuda.

REFERENCE

- [1] B. S. Tarwoco, N. Faizin, Y. Indriani, and E. Widodo, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2019-2021 Menggunakan Regresi Data Panel," *Buana Mat. J. Ilm. Mat. dan Pendidik. Mat.*, vol. 13, no. 2, pp. 113–124, Dec. 2023, doi: 10.36456/buanamatematika.v13i2.7232.
- [2] M. K. F. Akbar and M. Taufiq, "The Effect of Government Expenditure in Education, Health and Social Assistance Spending on the Poverty Rate of Yogyakarta Special Region Province," *J. Ekon. dan Bisnis Digit.*, vol. 2, no. 4, pp. 1187–1204, 2023.
- [3] M. M. Surur and I. Q. A'yun, "Determinants of Job Opportunities in Yogyakarta Special Regional Province," *Optim. J. Ekon. dan Pembang.*, vol. 13, no. 1, pp. 25–37, 2023, doi: 10.12928/optimum.v13i1.6300.
- [4] F. M. Zulham and T. H. N. Rochimah, "The image of the government of Yogyakarta Special Region on the privileged funds (Media online coverage on privileged funds issues in Tempo.co, Kompas.com and KrJogja.com 2012 – 2022)," *Symp. Lit. Cult. Commun. 2022*, vol. 3, no. 1, p. 300, 2023, doi: 10.12928/sylection.v3i1.13997.
- [5] M. Ramadhani, H. Hartanto, and M. Rusdi, "Arrangement and Implementation of Fulfillment of Health Guarantee Rights for Persons with Disabilities in the Special Region of Yogyakarta," *J. Leg. Cult. Anal.*, vol. 3, no. 1, pp. 57–72, 2024.
- [6] F. A. Rahman, W. Wahyudi, and S. Anwar, "Kajian Lingkungan Pembangunan Gedung Bertingkat di Daerah Istimewa Yogyakarta," *J. WILAYAH, KOTA DAN Lingkungan. BERKELANJUTAN*, vol. 2, no. 2, pp. 117–125, 2023.
- [7] S. Sugiyanto, N. Tiurmida, and T. A. Triono, "a Study of Green Independent Villages in Economic Aspects in the Special Region of Yogyakarta," *Int. J. Soc. Sci.*, vol. 2, no. 4, pp. 1819–1830, 2022, doi: 10.53625/ijss.v2i4.4144.
- [8] F. Finuliyah, S. Susilo, and P. M. A. Saputra, "The Promise of Fiscal Decentralization on the Threat of Poverty Rates in Special Region," in *Journal of*



- International Conference Proceedings*, 2023, pp. 368–383.
- [9] K. Raziq and L. L. N. El Hasanah, “Analisis determinan ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” *J. Kebijak. Ekon. Dan Keuang.*, vol. 2, no. 1, pp. 12–21, 2023.
- [10] S. Aripin, A. C. Pierewan, S. Susanti, and I. P. P. Salmon, “The Subjective Well-being Policy: Case Studies and Its Relevance in the Special Region of Yogyakarta, Indonesia,” *Soc. Psychol. (Gott)*, vol. 14, no. 2, pp. 152–168, 2023.
- [11] M. D. Susilowati, A. Yoga, and A. K. Apribilli, “Towards the Special Region of Yogyakarta with Pancasila Character Trough the Implementation of Regional Regulation No. 1 Year 2022 of DIY Province,” *Int. J. Multidiscip. Res. Anal.*, vol. 06, no. 06, 2023.
- [12] V. D. Purnomo, K. E. Suryono, and Y. Bowo, “Police Strategy in Preventing Street Crime in Yogyakarta,” *Formosa J. Appl. Sci.*, vol. 2, no. 4, pp. 525–540, 2023.

